Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta (tahun 2012-2016)

JURNAL

Dosen Pembimbing :

Abdul Hakim, SE, M.Ec, Ph.D

Ditulis Oleh:

Nama : Rohman Anugrah Sulistyo

Nomor Mahasiswa : 16313096

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016

Rohman Anugrah Sulistyo

16313096

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh IPM, PAD, UMK, dan Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan Ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data panel dengan data runtut waktu *(time series)* selama 5 tahun dari tahun 2012-2016 dan *cross section* sebanyak 5 Kabupaten di Provinsi Yogyakarta yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Data panel dilakukan melalui pendekatan *Random Effect Model* melalui Uji Chow, Uji Hausman, koefisien determinasi,uji R, uji f, dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, variabel PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan ekonomi, variabel UMK berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan ekonomi, variabel JP berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan ekonomi dan hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Random Effect Model* menunjukkan bahwa semua regressor (variabel independen) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah untuk menurunkan tingkat ketimpangan antar kabupaten.

Kata Kunci : Ketimpangan Ekonomi, *indeks theil*, IPM (indeks pembangunan manusia), PAD (pendapatan asli daerah), UMK (upah minium kabupaten), JP (jumlah penduduk).

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan secara terus-menerus dalam jangka panjang yang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang menjadi indikator moneter, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, melek huruf, kesejahteraan dan kemakmuran (Arsyad, 2010). Negara Indonesia adalah negara yang luas terdiri dari 5 pulau besar, yaitu : Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. Di dalam pembangunan Indonesia masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Dampak dari terjadinya ketimpangan ekonomi dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan ekonomi yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan ekonomi antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Noegroho dan Soelistianingsih (2007), mengatakan bahwa ketimpangan juga sering terjadi secara nyata di wilayah provinsi itu sendiri. Kesenjangan antar daerah terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi pada satu titik. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah belum banyak membawa hasil yang signifikan. Bahkan yang sering terjadi adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru dapat menambah kesenjangan baik terhadap distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan atau bidang usaha semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Tujuan dilakukannya pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk antar daerah dan antar sektor.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Modal yang ditanamkan dalam suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan produktifitas yang dapat menyebabkan peningkatan PDRB (Produk Domesti Regional Bruto). Dengan meningkatnya PDRB maka secara langsung pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah tersebut dapat terlihat dengan adanya wilayah yang maju dangan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan masalah yang berbeda dari masalah distribusi pendapatan. Apabila terjadi distribusi pendapatan yang sempurna maka tiap orang akan menerima pendapatan yang sama besarnya. Angka pendapatan per kapita yang ada selama ini merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap penduduk. Seberapa yang diterima oleh tiap penduduk sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karenanya pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan.

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap daerah yang memiliki modal sedikit,

sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik dan infrastruktur yang terbatas. Hal ini hanya berdampak positif terhadap daerah yang memiliki modal dan infrastruktur yang memadai. sehingga berakibat meningkatnya ketimpangan antar daerah (Todaro, 2000), tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, juga harus mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. kesempatan kerja bagi masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut adalah data keadaan pembangunan di Provinsi Yogyakarta:

Tabel 1.1

Data IPM Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016 (persen)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	76.15	76.44	76.81	77.59	77.89
SLEMAN	80.10	80.26	80.73	81.20	81.56
BANTUL	76.13	76.78	77.11	77.99	78.30
KULON PROGO	69.74	70.14	70.68	71.52	71.78
GUNUNG KIDUL	65.69	66.31	67.03	67.41	68.20

Sumber: BPS 2016

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki IPM tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain. Tahun 2016 IPM Kabupaten Sleman sebesar 81,56% menjadi yang tertinggi sedangkan IPM Gunung kidul tahun 2016 sebesar 68,20% dan menjadi yang terendah dibandingkan Kabupaten lainnya. Menurut data tabel

1.1 terjadi perbedaan tingkat IPM yang tinggi antara Kabupaten Sleman dengan daerah lainnya, ini mengindikasikan ada ketimpangan yang terjadi di Provinsi Yogyakarta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 1.2
Data PAD Kabupaten di Provinsi Yogyakarta
tahun 2012-2016 (ribu rupiah)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	241,190,745	304,797,499	404,272,608	449,849,108	507,875,473
SLEMAN	220,367,231	298,406,947	383,497,912	577,585,009	624,758,777
BANTUL	121,593,862	170,006,171	265,128,265	312,419,914	380,475,674
KULON PROGO	54,293,141	64,750,332	92,815,160	187,802,917	213,965,972
GUNUNG KIDUL	55,600,362	66,710,860	90,333,149	145,856,403	232,475,879

Sumber : BPS 2016

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri. PAD sendiri digunakan sebagai sumber APBD yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mampu untuk

mengurangi tingkat ketimpangan. Menurut data tabel 1.2, terjadi peningkatan PAD yang besar dari tahun 2015 ke tahun 2016. Ini merupakan pertanda yang positif karena dengan meningkatnya jumlah PAD maka pertumbuhn ekonomi juga akan ikut naik seiring dengan naiknya PAD. Kabupaten Sleman memiliki PAD paling besar pada tahun 2016 yakni sebesar 624,758,777 ribu rupiah dan Kabupaten Kulon Progo memiliki PAD terendah yaitu 213,965,972 ribu rupiah. 2 dari 5 Kabupaten PAD yang masih bisa dibilang terlalu mencolok yaitu kabupaten Sleman dan Kota yogya dibandingkan 3 kabupaten lainnya yaitu Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul.

Tabel 1.3
Data UMK per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta
tahun 2012-2016

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	892.660	1.065.247	1.173.300	1.302.500	1.452.400
SLEMAN	850.340	1.026.181	1.127.000	1.200.000	1.338.000
BANTUL	754.450	993.484	1.125.500	1.163.800	1.297.700
KULON PROGO	710.567	954.339	1.069.000	1.138.000	1.268.870
GUNUNG KIDUL	650.450	947.114	988.500	1.108.249	1.237.700

Sumber: DPPKA kab DIY

Pendapatan dari upah merupakan penghasilan bagi pekerja yang merupakan pendapatan terbesar dari rumah tangga dan memiliki kontribusi utama pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi upah yang di terima maka kesejahteraan rumah tangga juga akan meningkat. Jika melihat tabel 1.3 UMK di Provinsi Yogyakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan UMK diharapkan mampu menurunkan tingkat ketimpangan anntar daerah. UMK tertinggi masih dipegang oleh Kota Yogya yaitu sebesar 1.452.400 juta rupiah dan jarak antar keempat kabupaten tidak terlalu timpang artinya ketimpangan antar kabupaten pada sektor UMK tidak terlalu mencolok.

Tabel 1.4

Data Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta tahun 2012-2016

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	397,594	402,679	407,667	412,704	417,805
SLEMAN	1,128,943	1,141,733	1,154,501	1,167,481	1,182,561
BANTUL	934,674	947,072	959,445	972,511	983,672
KULON PROGO	398,672	403,179	407,709	412,198	415,201
GUNUNG KIDUL	692,579	700,191	707,794	715,282	721,435

Sumber: BPS 2016

Jumlah Penduduk merupakan besarnya populasi di setiap daerah. Menurut teori klasik semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat dikerjakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk diharapkan mampu membangun kesejahteraan daerahnya. Menurut data jumlah penduduk kabupaten di Provinsi Yogyakarta pada tabel 1.4, Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk tertinggi dari tahun ketahun dan bisa dikatakan mencolok dibandingkan kabupaten lainnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Sleman sebesar 1.182.561, Kabupaten Bantul sebesar 983.672, Kabupaten Gunung Kidul sebesar 721.425, Kota Jogja sebesar 417.805 dan jumlah penduduk terendah dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 415.201.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **"Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta Tahun 2012-2016".**

2. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta tahun.
3. Mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
4. Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta.

3. Kerangka Pemikiran

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah daerah yang maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama bersekolah, dan kekampuan daya beli masyarakat.

Menurut Teori semakin tinggi IPM maka menandakan daerah tersebut maju dan semakin tinggi IPM dapat menurunkan tingkat ketimpangan, hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Hanif Setiawan (2016), putri (2015) dan Nurhuda (2013) bahwa IPM berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

“H1: IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta.”

Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim,2004). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Semakin tinggi PAD maka menandakan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan, Maka semakin tinggi PAD dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten. Dalam penelitian Zulkarnaen Mardiansyah (2016), sinaga (2010), dan Nurhuda (2013) PAD berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

“H2: PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta.”

Hubungan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Upah minimum kabupaten (UMK) merupakan garis minimal dari pendapatan masyarakat yang bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam bekerja, apabila UMK meningkat maka konsumsi dan tabungan masyarakat juga akan meningkat. semakin tinggi UMK maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat sehingga akan menurunkan ketimpangan,. Hasil dari peneltian Ma’mun Musfidar menunjukkan UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Maka hipotesis yang dapat disimpulkan yaitu :

“H3: UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta”.

Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Jumlah penduduk (JP) merupakan besarnya populasi disetiap daerah. Menurut teori klasik semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat dikerjakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. semakin tinggi Jumlah Penduduk maka akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Teori ini sesuai dengan penelitian Crossandra Undulifolia (2012) dan Linggar dewangga puta (2011) bahwa Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Sehingga dapat dirumuskan hipoteisis sebagai berikut:

"H4: JP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta".

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data panel, yang artinya adalah gabungan antara data silang *(cross section)* dengan data runtut waktu *(time series).* Sebagai hasilnya data set panel akan berisikan informasi observasi setiap individual data sampel. Data panel dapat berguna bagi peneliti untuk melihat dampak ekonomis yang tidak bisa terpisahkan antar setiap individu dalam beberapa periode. Hal ini tidak bisa didapatkan dari penggunaan data cross section atau data time series secara terpisah. Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan metode panel yaitu :

1. Mengingat penggunaan data panel juga meliputi data cross section dalam rentang waktu tertentu, maka data set akan rentan dari heterogenitas. Penggunaan teknik dan estimasi data panel akan memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas tersebut.
2. Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih, tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.

3. Penggunaan data panel mampu meminimalkan bias yang dihasilkan jika kita mengagregasikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

   Ada 3 model yang dapat digunakan untuk menafsirkan data panel yaitu:

   1) Pooled Least Square (PLS) atau metode Common
   2) Fixed Effect Model (FEM)
   3) Random Effect Model (REM)

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari periode 2012-2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi Yogyakarta, internet, jurnal dan penelitian terdahulu, dan literatur – literatur yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperlukan antara lain berupa Indeks enthropi theil, IPM (indeks pembangunan manusia), PAD (Pendapatan asli daerah), Upah minimum kabupaten (UMK), dan Jumlah penduduk (JP).

HASIL DAN ANALISIS

1. Deskripsi Data

Skripsi ini meneliti mengenai analisis ketimpangan ekonomi yang ada di Provinsi Yogyakarta dengan menggunakan model data panel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersebut dalam bentuk data *cross section* serta data *time series* setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2012-2016. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan literatur yang terkait. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan asli daerah, Upah minimum kabupaten, dan Jumlah penduduk. Sedangkan variabel dependennya adalah Indeks Entrophy Theil.

2. Analisis Hasil Regresi

Dari kedua pengujian diatas yaitu Uji Chow dan Uji Hausman diperoleh hasil yaitu *Random Effect Model* merupakan model yang paling baik untuk dilakukan analisis.

Tabel 2.1

Estimasi Output Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/01/17 Time: 14:52
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 25
Swamy and Arora estimator of component variances
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.340652	1.791682	-0.190130	0.8511
IPM?	0.058744	0.020452	2.872319	0.0094
PAD?	4.62E-09	8.00E-10	5.775559	0.0000
UMK?	-1.97E-06	4.46E-07	-4.421286	0.0003
JP?	-3.11E-06	1.30E-07	-23.87633	0.0000
Random Effects (Cross)				
YOGYA—C	2.18E-08			
SLEMAN—C	-5.57E-09			
BANTUL—C	-7.16E-10			
K_PROGO—C	-3.20E-08			
G_KIDUL—C	1.64E-08			

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	5.07E-07	0.0000
Idiosyncratic random	0.005053	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.794327	Mean dependent var	0.852000
Adjusted R-squared	0.753193	S.D. dependent var	0.990349
S.E. of regression	0.492003	Sum squared resid	4.841333
F-statistic	19.31045	Durbin-Watson stat	0.340095
Prob(F-statistic)	0.000001		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.794327	Mean dependent var	0.852000
Sum squared resid	4.841333	Durbin-Watson stat	0.340095

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews 8

2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang telah diestimasi dengan data sesungguhnya. Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.794327 yang berarti bahwa sebanyak 79,43% variasi atau perubahan pada ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dalam model, sedangkan sisanya 20,57% dijelaskan oleh sebab lain di luar model yang digunkana dalam penelitian ini.

2.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi signifikan dalam menentukan nilai variabel terikat. Uji F merupakan pengujian terhadap variabel bebas (independen variable) secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Jika F-statistik < F-kritis (tabel) berarti Ho gagal ditolak atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika F-hitung > F-tabel berarti Ho ditolak atau variabel

independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Random Effect Model* menunjukkan nilai F-statistik sebesar 19.31045 dan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000001. Dengan membandingkan nilai F-statistik tersebut dengan nilai F-tabel sebesar 2,87 (α=5%) maka diketahui bahwa F-statistik lebih besar dari F-tabel. Dengan nilai probabbilitas F-Statistik 0.000001 yang lebih kecil dari tingkat signifikan (5%) maka Ho ditolak dan Hi diterima. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua *regressor* (variabel independen) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2.3 Uji T

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, termasuk juga intersep secara individu. Pengujian hipotesis melalui uji statistik t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh individual masing-masing variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya. Selain menguji signifikansi dengan *probability (t-statistic)* dengan α=5%, juga dilakukan uji arah atas nilai koefisiennya.

Hasil pengujian regresi dalam penelitian ini menunjukkan empat variabel bebas dinilai signifikan dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu IPM (0.0094), PAD (0.0000), UMK (0.0003), dan JP (0.0000). Secara umum persamaan model penelitian dapat ditulis sebagai berikut

Theil = -0.340652 + 0.058744 IPM + 0.00000000462 PAD – 0.00000197 UMK – 0.00000311 JP

Berdasarkan persamaan diatas diketahui bahwa nilai konstanta (intersep) sebesar -0.340652, menunjukkan tingkat ketimpangan secara umum adalah -0.340652 apabila nilai semua variabel independen adalah 0. Koefisien regresi IPM adalah 0.058744 mengindikasi bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara IPM dengan ketimpangan ekonomi artinya apabila terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) 1 poin maka tingkat

ketimpangan ekonomi akan meningkat 0.058744 poin. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (PAD) adalah 0.00000000462 mengindikasi bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan ketimpangan ekonomi artinya apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 1 poin maka tingkat ketimpangan ekonomi akan meningkat 0.00000000462 poin. Koefisien regresi variabel Upah minimum kabupaten (UMK) adalah -0.00000197 mengindikasi bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara UMK dengan ketimpangan ekonomi artinya apabila terjadi peningkatan UMK 1 poin maka tingkat ketimpangan ekonomi akan turun 0,00000197 poin. Koefisien regresi variabel Jumlah penduduk (JP) adalah -0.00000311 mengindikasi bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara JP dengan ketimpangan ekonomi artinya apabila terjadi peningkatan JP 1 poin maka tingkat ketimpangan ekonomi akan turun 0,00000311 poin.

3. Pengujian Hipotesis

Berikut akan diuraikan hasil pengujian atas keempat hipotesis yang sebelumnya telah dirumuskan.

IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta dengan probabilitas 0.0094. Variabel IPM memiliki koefisien sebesar 0.058744. Artinya jika setiap Menambahan 1 poin IPM maka terjadi peningkatan ketimpangan sebesar 0.058744 poin.

PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpanagn ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hasil pengujian regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* menunjukkan probabilitas 0.0000 dan koefisien sebesar 0.00000000462

.Artinya setiap ada penambahan pendapatan asli daerah 1 poin maka terjadi kenaikan ketimpangan ekonomi sebesar 0.00000000462 poin.

UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpanagn ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hasil pengujian regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* menunjukkan probabilitas 0.0003 dan koefisien sebesar -0.00000197 .Artinya setiap ada penambahan upah minimum kabupaten sebesar 1 poin maka terjadi penurunan ketimpangan ekonomi sebesar 0.00000197 poin.

JP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini JP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpanagn ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hasil pengujian regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* menunjukkan probabilitas 0.0000 dan koefisien sebesar -0.00000311 .Artinya setiap ada penambahan Jumlah penduduk sebesar 1 poin maka terjadi penurunan ketimpangan ekonomi sebesar 0.00000311 poin.

Semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Random Effect Model* menunjukkan nilai F-statistik sebesar 19.31045 dan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000001. Dengan membandingkan nilai F-statistik tersebut dengan nilai F-tabel sebesar 2,87 (α=5%) maka diketahui bahwa F-statistik > F-tabel sehingga disimpulkan bahwa semua *regressor* (variabel independen) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4. Interpretasi Hasil Akhir

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Ini berarti angka variabel indeks pembangunan manusia di Provinsi Yogyakarta baik dan bisa menjamin bahwa dapat menurunkan angka ketimpangan ekonomi yang terjadi. IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kenaikan nilai IPM kabupaten di Provinsi Yogyakarta dari tahun ke tahun dapat dijadikan jaminan bagi turunnya ketimpangan ekonomi disana. bahkan IPM di sleman tergantung sangat tinggi yaitu mencapai 81,56 ditahun 2016 hal tersebut bisa dikatakan sangat baik karena sudah melebihi angka standard daerah maju yaitu diatas 80%. Hal tersebut terjadi karena sudah sadarnya masyarakat jogja dalam menimba ilmu di dunia pendidikan baik dari jenjang dasar – menengah – menengah atas- dan perguruan tinggi. kesadaran masyarakat tersebut didukung oleh majunya sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Yogyakarta mengingat Jogjakarta disebut juga sebagai kota pelajar. Sayangnya pembangunan sarana dan prasarana terutama pendidikan lebih condong ke kota jogja dan kabupaten sleman. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya bangunan sekolah yang kurang layak terutaman di daerah Gunung kidul, tidak wajar jika pada tahun 2016 IPM gunung kidul hanya mencapai 68,20% sehingga sangat timpang jika dibandingkan dengan keempat daerah lainnya.

Tabel 4.1

Data IPM per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016 (persen)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	76.15	76.44	76.81	77.59	77.89
SLEMAN	80.10	80.26	80.73	81.20	81.56

BANTUL	76.13	76.78	77.11	77.99	78.30
KULON PROGO	69.74	70.14	70.68	71.52	71.78
GUNUNG KIDUL	65.69	66.31	67.03	67.41	68.20

Sumber: BPS 2016

Tabel diatas menunjukkan data IPM masing-masing kabupaten. Perbedaan antara Kabupaten Sleman sebagai pemilik IPM tertinggi dengan daerah lain sekitar 3 sampai 13%. bila melihat tabel 4.10 tentang Pendapatan asli daerah, terlihat pendapatan asli daerah yang diterima. Kabupaten Gunung kidul memiliki IPM terendah tetapi bukan memiliki pendapatan asli daerah terendah. Kabupaten kulon progo yang memiliki nilai IPM diatas Kabupaten Gunung kidul justru memiliki pendatan asli daerah terendah. Kabupaten Sleman yang berjarah sekitar 3 sampai 13% nilai IPM dibandingkan daerah lainnya, meimiliki pendapatan asli daerah relatif jauh dibandingkan kabupaten lainnya terutama kabupaten kulon progo dan gunung kidul yang terpaut 3 kali lihat lebih kecil dari kabupaten sleman ditahun 2016. Hal tersebut disebabkan karena kabupaten sleman yang dimulai tahun 2015 lebih banyak melakukan pembangunan terutama pada infrastrukur, mall, hotel, dan apartemen dibandingkan kabupaten lainnya.

Tabel 4.2

Data PAD per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016 (ribu rupiah)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	241,190,745	304,797,499	404,272,608	449,849,108	507,875,473
SLEMAN	220,367,231	298,406,947	383,497,912	577,585,009	624,758,777

BANTUL	121,593,862	170,006,171	265,128,265	312,419,914	380,475,674
KULON PROGO	54,293,141	64,750,332	92,815,160	187,802,917	213,965,972
GUNUNG KIDUL	55,600,362	66,710,860	90,333,149	145,856,403	232,475,879

Sumber : BPS 2016

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena besar pembayaran pajak tergantung dengan harta atau aset yang dimiliki oleh masing-maing individu. Jadi penduduk yang termasuk golongan kaya akan membayar pajak yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang masuk dalam golongan miskin. Kenaikan PAD dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi sehingga PAD yang digunakan sebagai sumber APBD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat menurunnkan ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta. PAD dikabupaten sleman dan kota Yogyakarta sangat mencolok dibandingkan dengan kabupaten lainnya, karena kedua daerah tersebut termasuk daerah kota di Provinsi Yogyakarta sehinnga besarnya PAD dikedua kabupaten tersebut mayoritas didapata dari pajak reklame, pajak hotel, restoran, retribusi dll. Disamping itu juga daerah-daerah di sleman dan kota jogja sebagian besar digunakan untuk potensi wisata (desa wisata) sehingga pendapatan dari desa wisata juga mempengaruhi ketimpangan PAD di kedua kabupaten tersebut terhadap kabupaten lain. dilihat pada tabel 4.11 menunjukkan upah minimum kabupaten. UMK di Provinsi Yogyakarta relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya.

Tabel 4.3

Data UMK per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	892.660	1.065.247	1.173.300	1.302.500	1.452.400
SLEMAN	850.340	1.026.181	1.127.000	1.200.000	1.338.000
BANTUL	754.450	993.484	1.125.500	1.163.800	1.297.700
KULON PROGO	710.567	954.339	1.069.000	1.138.000	1.268.870
GUNUNG KIDUL	650.450	947.114	988.500	1.108.249	1.237.700

Sumber: DPPKA kab DIY

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upah minimum kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta yang berarti bahwa jika UMP naik sekian maka akan menurunkan ketimpangan ekonomi. Di provinsi Yogyakarta perbedaan UMK antar kabupaten tidak terlalu mencolok dan kota jogja memilik UMK tertinggi dari kabupaten lainnya sehingga banyak masyarakat daerah pinggir seperti Bantul, Gunung kidul, dan Kulon progo yang lebih memilih bekerja di kota Yogyakarta dibandingkan daerah asalnya. sehingga jika UMK dinaikkan maka akan berpengaruh pada berkurangnya ketimpangan ekonomi di Provinsi yogyakarata. Pengaruh variabel UMK terhadap ketimpangan ekonomi lebih baik dibandingkan dengan pengaruh variabel lainnya karena peningkatan UMK dapat menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi.

Tabel 4.4

Data Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta tahun 2012-2016

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	397,594	402,679	407,667	412,704	417,805
SLEMAN	1,128,943	1,141,733	1,154,501	1,167,481	1,182,561
BANTUL	934,674	947,072	959,445	972,511	983,672
KULON PROGO	398,672	403,179	407,709	412,198	415,201
GUNUNG KIDUL	692,579	700,191	707,794	715,282	721,435

Sumber: BPS 2016

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hal ini berarti semakin besarnya jumlah penduduk mampu menurunkan ketimpangan ekonomi antar kabupaten di provinsi Yogyakarta. yang dimaksud dari menurunkan ketimpangan yaitu semakin banyak jumlah penduduk menandakan semakin banyak penduduk Jogjakarta yang berpendidikan (seperti yang dijelaskan pada bagian IPM) sehingga peluang bekerja untuk masyarakat jogja semakin tinggi mengakibatkan menurunnya ketimpangan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian mengenai hubungan variabel Indeks pembangunan manusia (IPM), Pendapatan asli daerah (PAD), Upah

minimum kabupaten (UMK), dan Jumlah penduduk (JP) terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten yang terjadi di Provinsi Yogyakarta. Pengaruh variabel UMK terhadap ketimpangan ekonomi lebih baik dari variabel yang lain karena setiap kenaikan UMK dapat menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah penduduk (JP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta
5. Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Random Effect Model* menunjukkan bahwa semua regressor (variabel independen) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

2. Saran

Variabel IPM dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hal ini tentunya harus diperhatikan pemerintah dengan baik terutama pada sektor pemerataan pembangunan. Karena selama ini pembangunan hanya terkonsentrasi pada daerah kota saja, sehingga daerah pinggir belum maksimal dalam melakukan pembangunan yang menyebabkan arus urbanisasi ke kota tinggi. Jika pembangunan merata maka akan

meningkatkan IPM dan PAD pada daerah pinggir dan akan menurunkan ketimpangan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Herwin, Mopangga (2011), "Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo". Jurnal Trikonomika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Vol. 10. No.1. Hal.40-51.

Nurhuda, Rama, 2013. "Analisis Ketimpangan Pembangunan studi di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2013. Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Diunduh tanggal 26 Oktober 2014, dari administrasi publik.studentjournal.ub.ac.id

Noegroho dan Soelistianingsih (2007), "Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional", Parallel Session IV A: Urban dan Regional Kampus UI Depok

Tiffani Ayu (2015), " Analisis Ketimpangan PDRB per kapita Antar Daerah Tahun 2014", Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Musfidar, M. (2010), " Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi selatan tahun 2001-2012", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan

Undulifolia, C. (2012), " Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Kudus tahun 2005-2009", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rachman, L, F. (2016), “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Grobokan tahun 2010-2014”, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Syafrizal (1997), “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat tahun 1997”, Jurnal Prisma LP3ES, No 3.

Noviana, DN. (2014), “ Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2003-2012”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.

Retnosari, D. (2006), “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat”, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Muhaimin, F. (2013), “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2011”. Jurnal Fakultas Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Zahara, F. (2013), “Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi di DIY tahun 2006-2011”, Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Nugroho, P. (2014), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Demak tahun 2008-2010.” Jurnal Universitas Brawijaya , Fakultas Ekonomi, Surabaya.

Sutarno Dan Kuncoro, M. (2004), “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di kabupaten Banyumas tahun 1993-2003.”, Jurnal Ekonomi Pembangunan AMP YKPN, Yogyakarta.

Rosyadi, I, M. (2014),” Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatra”. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Efendi, K (2013), “Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan antar Kabupaten di Provinsi Lampung”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung.

Syita, S. (2015), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi DIY tahun 2008-2014”. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Agustina, N. (2014), “Pengaruh Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2000-2013”. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Setiawan, H. (2016), “Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015”. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Putra, L. D. (2011), “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2007”, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Aimon, Amar, dan Putri (2012), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi, dari ejournal.unp.ac.id.

Adipuryanti dan Sudibia (2015), “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Bali”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali.

Saputro (2010), “Analisis Ketimpangan Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/kota di Jawa Tengah”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Jamzani (2010),”Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY dan Jawa Tengah”, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta.

Pauzi, A (2013), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distirbusi Pendapatan Provinsi Bali”, E-Jurnal EP Unud 5 (6):668-691, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.

Mahesa, P, N, (2010), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar”, E-jurnal EP Unud, 2 (3) : 119-128, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.

Yuliana, T, (2014), “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur”, Journal Economics and Policy, Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur.

Bantika, V, (2013), “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara”, E-Journal.Unsrat.ac.id, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Ginting (2014), “Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia”, E-Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Sekretariat Jendran DPR RI.

Rosmeli (2013), “Dampak Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Antar Daerah di provinsi Jambi”, Jurnal Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi, Jambi.

Restiatun (2009), “Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kabupaten di Provinsi DIY”, Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Barika (2012), “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/kota Di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2009”, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Efriza (2014), “Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di Era *Desentralisasi Fiscal”,* Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 2 no 2, Universitas Brawijaya, Malang.

Wahyuni, P, (2014), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/kota di Provinsi Bali”, E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayan, Bali.